

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Tanjung Eran
Kecamatan Pino
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran 2025

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I. Laporan Realisasi APBDes	
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Informasi Umum	i
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
2. Pendapatan Asli Desa	2
3. Dana Desa	3
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	3
5. Alokasi Dana Desa	3
6. Bantuan Keuangan Propinsi	3
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	3
8. Pendapatan Lain lain	3
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	4
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	4
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	4
12. BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	4
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	5
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	5
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	6
16. Pembiayaan	8
17. Aset Desa	8
18. Sisa Lebih Anggaran	8

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA TANJUNG ERAN
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Informasi Umum

Desa Tanjung Eran masuk wilayah Kecamatan Pino dengan luas wilayah Desa Tanjung Eran +925,4 ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 860 jiwa penduduk tetap di tahun 2025. Letak Geografis Desa Tanjung Eran berada di wilayah Tenggara Kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa Desa Tanjung Eran merupakan salah satu desa dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu yang terletak +_ 160 KM dari Propinsi Bengkulu, 12 KM dari Kabupaten Bengkulu Selatan, 4 KM dari Kantor Camat Pino.

Kepala Desa Tanjung Eran merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa dalam unit di desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Semua wewenang dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai tugas dan jabatannya untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa. Satuan Kerja Perangkat Desa merupakan bentuk Pemerintahan yang terkecil dalam struktur Pemerintahan Pusat.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kepala Desa | : Rudi Hartono |
| b. Sekretaris Desa | : Ilman |
| c. Kaur Keuangan | : Samsul Ari Bowo |
| d. Kaur Umum & TU | : Neli Agustin |
| e. Kaur Perencanaan | : Yardin |
| f. Kasi Pemerintahan | : Yena Yulia |
| g. Kasi Pelayanan | : Kiki Putriani |
| h. Kasi Kesejahteraan | : Kisro |

Pelaporan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 dibuat berdasarkan data realisasi keuangan desa.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2024 menggunakan basis kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dalam rangka penerapan akuntansi basis kas pada pelaporan keuangan Pemerintah Desa tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset desa Desa yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tanjung Eran kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		35.716.440,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	21.224.899,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	21.224.899,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.124.346.396,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.124.346.396,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	980.906.334,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	138.000.000,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		1.118.906.334,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	0,00	
2. SPJ Panjar	0,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		41.156.502,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapat asli Desa yang dapat di hasilkan adalah merupakan Bagi hasil BUM Desa Tiga Serumpun Tanjung Eran:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	1.523.400,0	1.523.400,0	0,0
Hasil Aset Desa	0,0	0,0	0,0
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,0	0,0	0,0
Jumlah	1.523.400,0	1.523.400,0	0,0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	688.142.000,0	688.142.000,0	0,0
Rincian Tahapan Realisasi Dana Desa :			
Tahap I	20 – Maret 2025	56.440.400,-	
Tahap II	20 – Maret 2025	328.224.600,-	
Tahap III	03- Sept - 2025	218.816.400,-	
Tahap IV	03- Sept - 2025	84.660.600,-	

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	18.955.800,00	18.955.800,00	0,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	414.470.000,00	414.470.000,00	0,00

Dengan Rincian Tahapan Penerimaan adalah :

	Tanggal	Realisasi
Tahap I	24 Maret 2025	165.788.000,-
BPJS Kes		2.563.200,-
Tahap II	18 Juli 2025	163.224.800,-
Tahap III	05 – Desember 2025	82.894.000,-

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bengkulu Selatan adalah sebagai :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	0,00	1.255.196,00	(1.255.196,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	1.255.196,00	(1.255.196,00)

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	329.098.400,0	328.984.000,0	114.400,0
Belanja Barang dan Jasa	109.167.940,0	101.304.034,0	7.863.906,0
Belanja Modal	6.300.000,0	6.300.000,0	0,0
Belanja Tidak Terduga	0,0	0,0	0,0
Jumlah	444.566.340,0	436.588.034,0	7.978.306,0

Pada Belanja Barang dan Jasa yang mengalami sisa lebih anggaran mencapai Rp. 7.863.906,- hal tersebut merupakan sisa lebih anggaran Operasional Pemerintah Desa sumber Dana Desa 3 % yang semula di anggarkan untuk Bantuan Sosial (Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Transport Rumah Sakit)) dan anggaran belanja kordiansi dan perjalanan dinsa kepla desa dan perangkat desa yang tidak terserap seluruhnya.

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,0	0,0	0,0
Belanja Barang dan Jasa	232.432.300,0	229.123.300,0	3.309.000,0
Belanja Modal	271.114.000,0	244.625.000,0	26.489.000,0
Belanja Tidak Terduga	0,0	0,0	0,0
Jumlah	503.546.300,0	473.748.300,0	29.798.000,0

Pada Belanja Modal Pembangunan memiliki Silpa yang cukup besar untuk kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Betitik Ulu yang tidak dapat terserap 100%, karena beberapa kondisi lapangan yang mempengaruhinya. Untuk Kegiatan tersebut dari anggaran sebesar Rp. 216.614.000,- hanya terserap sebanyak Rp. 190.125.000,- atau sebesar 87 %.

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,0	0,0	0,0
Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,0	12.000.000,0	0,0
Belanja Modal	0,0	0,0	0,0
Belanja Tidak Terduga	0,0	0,0	0,0
Jumlah	12.000.000,0	12.000.000,0	0,0

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,0	0,0	0,0
Belanja Barang dan Jasa	49.895.000,0	47.770.000,0	2.125.000,0
Belanja Modal	0,0	0,0	0,0
Belanja Tidak Terduga	0,0	0,0	0,0
Jumlah	49.895.000,0	47.770.000,0	2.125.000,0

Sisa lebih anggaran pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bersumber dari Sisa anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan BPD yang tidak terserap seluruhnya.

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,0	0,0	0,0
Belanja Barang dan Jasa	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal	0,0	0,0	0,0
Belanja Tidak Terduga	10.800.000,0	10.800.000,0	0,0
Jumlah	10.800.000,0	10.800.000,0	0,0

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.500.000,0	51.500.000,0	0,0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	178.498.400,0	178.494.800,0	3.600,0
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.600.000,0	3.489.200,0	110.800,0
Tunjangan BPD	95.500.000,0	95.500.000,0	0,0
Jumlah	329.098.400,0	328.984.000,0	114.400,0

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	37.458.700,0	37.432.500,0	26.200,0
Belanja Jasa Honorarium	235.750.000,0	233.850.000,0	1.900.000,0
Belanja Perjalanan Dinas	52.250.000,0	45.135.000,0	7.115.000,0
Belanja Jasa Sewa	0,0	0,0	0,0
Belanja Operasional Perkantoran	47.836.540,0	46.879.834,0	956.706,0
Belanja Pemeliharaan	8.950.000,0	8.950.000,0	0,0
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.250.000,0	17.950.000,0	3.300.000,0
Jumlah	403.495.240,0	390.197.334,0	13.297.906,0

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	60.800.000,0	60.800.000,0	0,0
Belanja Modal Kendaraan	0,0	0,0	0,0

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	216.614.000,0	190.125.000,0	26.489.000,0
Belanja Modal Jembatan	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase /Air Limbah/Persampahan	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,0	0,0	0,0
Belanja Modal Lainnya	0,0	0,0	0,0
Jumlah	277.414.000,0	250.925.000,0	26.489.000,0

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	432.720.540,0	424.742.234,0	7.978.306,0
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,0	0,0	0,0
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.300.000,0	6.300.000,0	0,0
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.545.800,0	5.545.800,0	0,0
Sub Bidang Pertanahan	0,0	0,0	0,0
Jumlah	444.566.340,0	436.588.034,0	7.978.306,0

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	74.370.000,00	73.761.000,00	609.000,00
Sub Bidang Kesehatan	67.939.000,00	67.139.000,00	800.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	289.057.300,00	260.668.300,00	28.389.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	72.180.000,00	72.180.000,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	503.546.300,0	473.748.300,0	29.798.000,0

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	44.500.000,00	42.375.000,00	2.125.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	49.895.000,00	47.770.000,00	2.125.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
Jumlah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	35.716.440,00	35.716.440,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	(102.283.560,00)	(102.283.560,00)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	35.716.440,00	35.716.440,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.716.440,00	35.716.440,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00

17. Sisa Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sisa lebih Anggaran tahun berjalan berdasarkan Sumber Dana :

Uraian	SILPA 2025
PAD	
DD	39.413.000,0
ADD	140.600,0
BHPR	
DLL (Bunga Bank)	1.602.902,0
SILPA 2025	41.156.502,0

18. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,0	0,0	0,0
Peralatan dan Mesin	61.204.300,0	60.800.000,0	122.004.300,0
Gedung dan Bangunan	0,0	0,0	0,0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	285.149.000,0	190.125.000,0	475.274.000,0
Aset Tetap Lainnya	0,0	0,0	0,0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,0	0,0	0,0
Aset Tak Berwujud	0,0	0,0	0,0
Jumlah Aset Tetap	346.353.300,0	250.925.000,0	597.278.300,0

Aset desa tersebut diatas merupakan nilai asset desa untuk perolehan dua tahun berjalan sesuai dengan harga perolehan. Dan secara umum merupakan asset tidak lancar. Karena Aset yang diperoleh merupakan nilai asset bangunan dan peralatan mesin. Aset tersebut berupa, Laptop, Tablet, Printer, Lampu Penerangan Jalan dan Jalan Usaha Tani.

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas Desa, Piutang, dan Persediaan.

- 1) Kas Desa diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Kas Desa meliputi Kas di Bendahara Desa dan Kas di Rekening Kas Desa.
- 2) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari hasil usaha desa, pemberian fasilitas/jasa desa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- jumlah piutang dapat diukur;

Piutang disajikan sebesar nilai transaksinya.

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa, barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dan barang yang berasal dari sisa kegiatan yang masih dapat dimanfaatkan. Nilai Persediaan, diperoleh dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan, dengan menggunakan nilai pembelian terakhir.

